



# PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO PERSERODA

Nomor : 020/BPR-TR/OPS/1/2023

Lamp : 1 (satu) Set

Kepada Yth :

Ketua Umum DPP PERBARINDO

Rumah Perbarindo Komp. Patra II No 46

Jl. Ahmad Yani Bypass Cemapaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4261445

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ( GCG ) Tahun 2022  
PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda.**

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2022 PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda. ( Dokumen Terlampir )

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan bimbingan bapak, Direksi mengucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 27 Januari 2023

**PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA**  
Direksi,

**Muhammad Asril, SE**  
Direktur Utama





# PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO PERSERODA

Nomor : 019/BPR-TR/OPS/I/2023  
Lamp : 1 (satu) Set

Kepada Yth :  
Pimpinan Media BPR  
Jl. A. Yani, Bypass Komp. II No. 46  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat  
Telp. 021-4261445

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ( GCG ) Tahun 2022  
PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda.**

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2022 PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda. ( Dokumen Terlampir )

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan bimbingan bapak, Direksi mengucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 27 Januari 2023  
PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA  
Direksi,



**Muhammad Asril, SE**  
Direktur Utama



# PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO PERSERODA

Nomor : 003/BPR-TR/OPS/1/2023

Lamp : 1 (satu) Set

Kepada Yth :

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi

Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 12 A

Kecamatan Danau Sipin

Kota Jambi – 36129

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ( GCG ) Tahun 2022**  
**PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda,**

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2022 PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda. ( Dokumen Terlampir )

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan bimbingan bapak, Direksi mengucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 27 Januari 2023

**PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA**  
Direksi,

**Muhammad Asril, SE**  
Direktur Utama

Tembusan :

- Arsip



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505755-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600817-26012023174540

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

muhdasrilpdbprtr@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-26 17:45:40



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA  
JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
PROV. JAMBI

Telepon: (0742) 7351791

Website: -. Email: pd.bprtanggorajokualatungkal@yahoo.co.id

---

LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA  
TAHUN 2022



JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG  
BARAT PROV. JAMBI

TELEPON: (0742) 7351791

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROV. JAMBI

Nomor Telepon : (0742) 7351791

Penjelasan Umum : Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.. . Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui Komisarisasi yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.. . Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.. Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) SE OJK NO 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.... . Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) d

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhammad Asril, SE	Direktur Utama	Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2022 hal-hal yang telah dilakukan antara lain : a.Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.. b.Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.. c.Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:. Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.. Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen. d.Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking).. e.Melakukan review suku bunga dana dan kredit (funding dan lending), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.. f.Pembahasan rencana penambahan modal disetor oleh Pemda Tanjung Jabung Barat. g.Pembahasan mengenai dana-dana kegiatan pemda, seperti gaji, dana TPP, gaji TTK dan dana kegiatan OPD lainnya yang bisa ditempatkan pada BPR Tanggo Rajo.. h.Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada..

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

a.Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b.Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.. c.Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi. Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan sosialisasi dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku.. d.Monitor secara ketat debitur yang berdampak pada peningkatan NPL.. e.Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.. f.Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing- masing.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DR. Muhammad Safri, SE. MSi.	Komisaris Utama	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarisan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
2	Iwan Eka Putra, SE, MM.	Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarisan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

a.Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b.Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.. c.Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan sosialisasi dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.. d.Memonitor secara ketat debitur yang akan berdampak pada NPL, dan dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.. e.Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2022.. f.Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.. g.Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Memiliki

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Asril, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Asril, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR. Muhammad Safri, SE. MSi.	3.750.000	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. Muhammad Safri, SE. MSi.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Iwan Eka Putra, SE, MM.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan Dewan Komisaris / Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris / Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. Muhammad Safri, SE. MSi.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Iwan Eka Putra, SE, MM.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga Dewan Komisaris / Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris / Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	124887000	2	207212508
2	Tunjangan	1	179837280	0	0
3	Tantiem	1	40600155	2	49622411
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	1	50787380	0	0
	Total		396111815		256834919

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi kepada Direksi dan Komisaris telah sesuai dengan hasil RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rumah Dinas (1)	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	BPJS Kesehatan (2)
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian fasilitas telah berdasarkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,45	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,43	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,57	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perhitungan Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah berdasarkan Daftar Gaji Komisaris, Direksi dan Karyawan PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda per Desember 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-01-2022	8	1.Pembentukan panitia seleksi untuk pemilihan Direktur masih terkendala faktor hukum yang terjadi pada pemberhentian Direktur, sehingga menunggu penyelesaiannya.. 2.Vendor baru BPR utk IT. 3.Kerjasama dengan PDAM untuk penyediaan Meteran PDAM. 4.Sinergi dengan PKK melalui pembiayaan, seperti: -Pengadaan bahan baku Batik Tungkal. -Bibit penggemukan sapi. - Pengembangan petani melalui petani nanas, jahe, dan lain lain. -Mesin pencacah makanan ternak. -Dana arisan untuk pembelian sapi melalui OPD. 5.Kemungkinan Kerjasama dengan BUMDes untuk memperluas kredit. 6.Penyaluran dana Desa melalui BPR terutama untuk daerah Iilir. 7.Penyelesaian kredit macet terkait nasabah meninggal (Nasabah PNS) dan memohon mediasi kepada OJK untuk mengadakan pertemuan antara BPR. dan Asuransi. 8.Untuk lebih memaksimalkan atas penerapan pelaksanaan APU / PPT..
2	09-03-2022	8	1.Usulan Dana 2 Milyar (Ultra mikro / mitra kredit UMKM). 2.Perubahan anggaran Dasar dana 2 milyar. 3.Kerjasama dengan Koperasi = Proses pengajuan dan pencairan (Jaminan dan bisnis dan bunga serta besarnya). 4.Pemantauan Kredit Koperasi.. 5.Pemangkas TPP oleh kebijakan pemerintah (Menkeu), kalau bisa disimulasikan.. 6.Perjuangan untuk KURDA, jika ada pemangkas TPP. 7.Restrukturisasi Kredit Covid-19. 8.Perkembangan IT = Digitalisasi (mobile banking) Surat Perjanjian dengan Vendor. 9.Funding untuk peningkatan sumber dana. 10.SDM untuk menjalin komunikasi stakeholder (tambahan SDM). 11.Menjaring merekrut dan menseleksi untuk Direksi (Direktur) penggantian Direktur lama.
3	12-04-2022	8	1.Kinerja keuangan hingga maret 2022. 2.Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berupa produk-2 dan informasi lainnya ditetapkan petugas penjaga, dan Promosi-promosi dari BPR seperti brosur, dll. 3.Usulan karyawan untuk pemberian THR.. 4.Kinerja kredit terdapat fenomena PNS (pemotongan) utk lebih diperhatikan. 5.Dana bazda utk pemotongan 2,5% zakat diarahkan ke BPR Tanggo Rajo dengan membuka rekening. 6.Mencari sumber dana (murah) lain, utk meningkatkan peningkatan penyaluran kredit.. 7.TP3K dan outsourcing utk diarahkan ke BPR Tanggo Rajo. 8.Meremind pegawai tentang peraturan kepegawaian. 9.Menunggu hasil KAP untuk RUPS. 10.Untuk lebih memaksimalkan atas penerapan pelaksanaan APU / PPT.
4	06-06-2022	8	1.Kinerja keuangan akhir Mei 2022. 2.Awal Juni 2022 NPL 6,3%. 3.Bulan Mei 2022, ada 4 ASN naik coll 3, jadi NPL 6,3%. -Melalui kepala dinas untuk nasabah yang bersangkutan. - Pemindahan / takeover ke Bank Jambi nasabah bersangkutan. 4.Pemblokiran Rekening nasabah ada permasalahan hukum / tidak. 5.Kredit Mikro 2 milyar, Juli 2022 dilakukan sosialisasi ke desa.. 6.Laba perusahaan belum mencapai target RBB, perlu evaluasi kembali. 7.Progress Vendor masih dalam proses penginputan data. 8.Mutasi asset tetap. 9.Outstanding masih kecil, upaya ditingkatkan melalui kredit mikro.
5	28-07-2022	8	1.Hasil Audit OJK. 2.Penjelasan manajemen untuk pencapaian RBB. -Penghimpunan dana masih cukup jauh dari target. -Menyusun five line sektor ekonomi yang dapat dikembangkan BPR. - Rencana pelatihan. 3.Evaluasi kinerja RBB 30 Juni 2022. -Belum secara maksimal karena ada kredit ASN yang menunggak atau macet. -Sulitnya persaingan suku bunga bank umum. -Dana pihak ketiga karena banyaknya penarikan, ada beberapa kredit take over. -Target laba capaian hanya 72% tergerus dari PPAP kredit ASN. -Penyelesaian kredit ASN melalui take over ke Bank Jambi. -Permodalan 25 % dari modal Dasar, pada sistem tidak mau di input. -Kurda diperkirakan pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2024. 4. Untuk lebih memaksimalkan atas penerapan pelaksanaan APU / PPT..
6	14-09-2022	8	1.Permasalahan hukum dgn ibu dewi masih belum final, menunggu keputusan Bupati. 2.Kenaikkan harga BBM = usulan kenaikan tunjangan pegawai. Kenaikkan tunjangan transport karena adanya kenaikan BBM. 3.Pelatihan SDM APU / PPT pada hari sabtu, tgl 24 september 2022. 4.Pelatihan AO untuk 7 pegawai. 5.LHKPN terakhir tgl 30 september 2022. 6.Pertemuan dgn Ikatan Pedagang Pasar = kerjasama kedepannya. -Penanggulangan tanggung renteng asosiasi jika ada kerugian Menurunkan tingkat bunga utk pedagang atau lebih rendah dari kredit umum. 7.Pelatihan utk UMKM bagi pedagang. 8.Rencana studi banding ke sidoarjo tentang KURDA. 9.Analisis kinerja keuangan hingga akhir agustus 2022 =laba menurun sekitar 20%. 10. pertumbuhan kredit masih stagnan , perlu diperkuat kembali dengan inovasi kredit.
7	13-10-2022	8	1.Kinerja Keuangan = NPL per 30 September 2022 sebesar 4,79% penyebabnya ada 3 nasabah yg cukup menyumbang NPL. 2.Persiapan rencana bisnis (RBB) tahun 2022. 3.Menetapkan core banking system (CBS) akhir bulan desember 2022 menggunakan USI = bagaimana implementasi USI.. 4.Program mobile banking (e-cash) masuk dalam RBB. 5.Masalah hukum dengan Direktur (Ibu Dewi). 6.Pengajuan usulan KURDA ke Pemda. 7.Kinerja Kredit turun dan biaya meningkat bulan September 2022. 8.Peluang Payroll utk P3K diusulkan kerjasama dengan BPR. 9.Penguatan penagihan ke nasabah utk tim penagihan hingga akhir tahun (motivasi dan lingkungan kerja serta reward and punishment).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
8	07-11-2022	8	1.Kinerja Keuangan Akhir Oktober 2022 NPL per 07 Oktober 2022 ada beberapa nasabah yg cukup menyumbang NPL (1 nasabah tgl 08 Okt 2022 akan selesai), mhn di list daftar kredit macet dan diberikan target penyelesaian.. 2.Adanya Peningkatan NPL 5,27% akhir Oktober 2022 dan target diupayakan NPL dibawah 3% di akhir desember 2022 dan penguatan kinerja kredit (AO) untuk me-maintenance kredit agar mengurangi resiko macet.. 3.Perangkat Desa turut membantu untuk kredit macet sebagai komitmen dari perangkat desa untuk penyelesaian kredit.. 4.Inovasi kredit TPP untuk dikembangkan sebagai potensi kredit. 5.Adanya kebijakan punishment utk pegawai yg berkinerja rendah agar dilakukan sesuai standar penilaian kinerja mengingat adanya resiko dari pegawai.. 6.Pelatihan SDM via online self assessment dgn KPI, yaitu penilaian kinerja karyawan. 7.Pelatihan SDM terkait hukum dan lelang.. 8.Vendors terkait dengan laporan tahunan, masih menggunakan vendors lama. 9.Marketing terkait layanan utk pembuatan ruangan AO di lt bawah, dilaksanakan th 2022 atau tahun 2023. 10.Evaluasi kinerja AO mengingat persaingan yang ketat. 11.Pembayaran Deviden ke Pemda. 12.Persiapan rencana bisnis (RBB) th 2023.
9	29-11-2022	8	1.Idle asset yg berupa tanah yg akan di jual untuk cash tempo hingga selesai pembayaran, baru sertifikat diserahkan. 2.Struktur organisasi dengan POJK terbaru (versi baru). 3.Masalah SDM yaitu pegawai kontrak yang sakit (rencana mengundurkan diri), pegawai yang kurang disiplin dengan SP. 4.Kinerja kredit untuk penagihan kepada nasabah dan ada 2 nasabah yang sulit untuk di tagih (solusi agar mencari jaminan tanah nasabah).. 5.Pembahasan RBB 2023. 6.NPL yang masih tinggi, utk mencari solusi penyelesaian kredit macet.. 7.Untuk lebih memaksimalkan atas penerapan pelaksanaan APU / PPT..
10	29-12-2022	8	1.Kinerja BPR hingga Desember 2022, diharapkan NPL di bawah 3% atau terdapat progress yang cukup baik pada akhir Desember 2022. 2.Pelatihan KPI untuk system penilaian kinerja terhadap karyawan dan sosialisasi KPI. 3.Pembuatan Layout di lantai 1 dan ruang komisaris. 4.Penjualan Idle Aset. 5.Terkait SDM An. Nasri dan Septiaini, dan karyawan An Ade (sakit).

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hasil rapat Dewan komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DR. Muhammad Safri, SE. MSi.	10	0	100,00
2	Iwan Eka Putra, SE, MM.	10	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode tahun 2022 telah diselenggarakan rapat berkala Dewan Komisaris, Hasil rapat Dewan komisaris tersebut dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota dewan komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyimpangan internal pada tahun sebelumnya telah di selesaikan, dan penyimpangan internal pada tahun laporan dalam proses penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam proses penyelesaian hukum.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220428	Kegiatan Sosial	Pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR memberikan dana CSR kepada masyarakat.( Masjid, Madrasah/Sekolah,dll)	Masyarakat	64.074.657
2	20220304	Kegiatan Sosial	Pelaksanaan bantuan ke Masjid Al Anshor Kuala Tungkal	Pengurus Masjid	500.000
3	20220524	Kegiatan Sosial	Pelantikan pengurus Forum Honorer Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 s/d 2025	Pengurus Forum Honorer	500.000
4	20221024	Kegiatan Sosial	Pelaksanaan Expo Financial FK - IJK Tahun 2022	Pengurus FK - IJK	1.500.000
5	20221123	Kegiatan Sosial	Memberikan bantuan bersama Perbamide untuk korban gempa di Cianjur Provinsi Jawa Barat	Forum Peduli Cianjur	1.000.000
6	20220110	Kegiatan Sosial	Pelaksanaan bantuan ke Masjid Al Musthakoh Lil Habib Kuala Tungkal	Pengurus Masjid	500.000
7	20220425	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan sembako kepada anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Kuala Tungkal	Pengurus Panti Asuhan	5.028.600
8	20220823	Kegiatan Sosial	Bantuan pelaksanaan perayaan HUT Tanjab Barat ke-57 dan HUT RI ke 77	Panitia HUT RI	1.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR. Sebagai bentuk kepedulian PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan / corporate social responsibility, Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat memberikan Penghargaan atas Partisipasi dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Tahun 2022.

Nama BPR	: PT BPR Tanggo Rajo Perseroda
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROV. JAMBI
Nomor Telepon	: (0742) 7351791
Modal Inti BPR	: 40.655.152.093,00
Total Aset BPR	: 76.194.776.765,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Manajemen PT. BPR TANGGO RAJO Perseroda telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). . Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka PT. BPR TANGGO RAJO Perseroda juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :. 1.Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG). 2.Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.. 3.Dewan Komisaris telah melakukan Komisarisasi terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.. 4.Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.. 5.Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dan manajemen risiko dan kepatuhan dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.. 6.BPR memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat eksekutif Audit Intern, dan kepatuhan dan manajemen resiko.. 7.Telah melaksanakan action plan terkait penyelesaian kredit bermasalah... Demikian pelaksanaan tata kelola (Good Corporate Governance) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR TANGGO RAJO Perseroda dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,80	0,18	1,98	0.396	Jumlah anggota direksi per akhir Desember 2022 memiliki 1 direksi yaitu Direktur Utama, sedangkan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur YMF Kepatuhan terhitung tgl 1 Desember 2021 tidak lagi menjabat sebagai direksi sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum memenuhi prinsip-prinsip GCG.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,85	0,20	1,89	0.284	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi Komisarisan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,30	0,80	0,20	2,30	0.230	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,15	1,95	0.049	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,86	0,20	2,06	0.206	PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Jumlah anggota direksi per akhir Desember 2022 memiliki 1 direksi yaitu Direktur Utama, sedangkan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur YMF Kepatuhan terhitung tgl 1 Desember 2021 tidak lagi menjabat sbg direksi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota direksi berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non bank atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	BPR tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan. telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya. dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi telah melaksanakan upaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda sudah terpenuhi 2 (dua) orang dan telah sesuai dengan ketentuan.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda terdiri dari 2 (dua) : yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya untuk bertindak.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris PT. BPR Tanggo Rajo tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris PT. BPR Tanggo Rajo pada tahun 2021 telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hingga akhir Desember 2021 Dewan Komisaris PT. BPR Tanggo Rajo telah melaksanakan rapat rutin minimal 2 (kali) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, direksi dan PE.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Rapat antara Dewan Komisaris maupun bersama Direksi dan pegawai dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan tertib.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif (PE) tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Di BPR terdapat penyediaan fasilitas dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta memenuhi segala ketentuan dan prosedur yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada transaksi yang mengandung benturankepentinganyangdapat. merugikan BPR atau mengurangi potensi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	4	Per akhir Desember 2021 tidak ada Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Per akhir Desember 2021 tidak ada Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Penunjukan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan BPR telah dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Direksi No : 017/SK-DIR/BPR-TR/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017. PE Kepatuhan yang menangani fungsi Kepatuhan adalah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Telah menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan BPR yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2021 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari POJK dan/ atau peraturan perundang- undangan lain sesuai ketentuan OJK. Jika terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan regulator maka Direktur BPR yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern BPR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) pada BPR telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah mendukung peningkatan mutu keterampilan SDM manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutkan PE AI dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE Audit Intern BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Januari 2022 dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	BPR tidak menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan modal inti BPR belum mencapai Rp. 50 Miliar.
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR Tanggo Rajo menugaskan audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Henry & Sugeng telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan di BPR dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Henry & Sugeng yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan KAP dimaksud juga telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Henry & Sugeng
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit di BPR telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai BPR telah mengangkat sdr. Heri Chandra, SE sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen risiko sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi Nomor: 017/SK-DIR/BPR-TR/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses Manajemen Risiko yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR sesuai dengan kategori BPR telah mengelola 4 (empat) jenis risiko.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah memproses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK nihil sebab BPR dalam menyalurkan kredit tidak melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: (a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. . (b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. dan. (c) penerapan manajemen risiko..
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris BPR telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tanggo Rajo Perseroda

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kuala Tungkal, 26 Januari 2023

PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA

Menyetujui

Muhammad Asril, SE  
Direktur Utama

DR. Muhammad Safri, SE, MSi  
Komisaris Utama



**PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA**  
JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
PROV. JAMBI

Telepon: (0742) 7351791

Website: -. Email: pd.bprtanggorajokualatungkal@yahoo.co.id

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA
Alamat	: JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROV. JAMBI
Nomor Telepon	: (0742) 7351791
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp40.655.152.093,00
Total Aset	: Rp76.194.776.765,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,98	0.396
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,89	0.284
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,3	0.23
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,1	0.21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,95	0.049
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,06	0.206
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.98)**

Jumlah anggota direksi per akhir Desember 2022 memiliki 1 direksi yaitu Direktur Utama, sedangkan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur YMF Kepatuhan terhitung tgl 1 Desember 2021 tidak lagi menjabat sebagai direksi sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum memenuhi prinsip-prinsip GCG.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.89)**

Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi Komisaris yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan BPR.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.3)**

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)**

Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.95)**

Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.06)**

PT. BPR Tanggo Rajo Perseroda telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan



ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)**

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK

**10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)**

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)**

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.

**C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Manajemen PT. BPR TANGGO RAJO Perseroda telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka PT. BPR TANGGO RAJO Perseroda juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
2. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
3. Dewan Komisaris telah melakukan Komisarisan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
4. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
5. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dan manajemen risiko dan kepatuhan dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
6. BPR memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat eksekutif Audit Intern, dan kepatuhan dan manajemen resiko.
7. Telah melaksanakan action plan terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Demikian pelaksanaan tata kelola (Good Corporate Governance) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR TANGGO RAJO Perseroda dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.



PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA  
JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS,SH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
PROV. JAMBI

Telepon: (0742) 7351791

Website: -. Email: pd.bprtanggorajokualatungkal@yahoo.co.id

---

Kuala Tungkal, 26 Januari 2023

PT. BPR TANGGO RAJO PERSERODA

Menyetujui



MuhammadAsril,SE  
Direktur Utama



DR. MuhammadSafri,SE,MSi  
Komisaris Utama